

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek

Pada BAB ini penulis menyajikan gambaran umum objek dari penelitian ini, yaitu kondisi geografis, kondisi ekonomi, kondisi infrastruktur (jalan, air, listrik) dan juga PMA (Penanaman Modal Asing) di 33 provinsi di Indonesia.

##### 1. Kondisi Geografis Negara Indonesia.



Sumber: *peta-hd.com*

#### GAMBAR 4.1

Peta provinsi di Indonesia

Secara Geografis, Negara Indonesia diapit diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia memiliki *total* 17.504 pulau dengan kurang lebih 270.054.853 jiwa menurut data BPS 2018. Posisi ini merupakan posisi yang sangat strategis dan memainkan peran

penting pada perekonomian negara. Posisi ini meletakkan Indonesia pada persimpangan lalu lintas dunia. Dalam melakukan hubungan perdagangan internasional dan menentukan masa depan negara, letak geografis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

Secara Astronomis, Negara Indonesia terletak pada  $6^{\circ}$  LU (Lintang Utara) -  $11^{\circ}$  LS (Lintang Selatan) dan antara  $95^{\circ}$  BT (Bujur Timur) -  $141^{\circ}$  BT (Bujur Timur) yang mana menempatkan Indonesia dikawasan tropis dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan iklim tropis. Hal ini membuat Indonesia selalu disinari matahari sepanjang tahun. Terdapat dua kali pergantian musim di Indonesia dalam setahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Umumnya, negara-negara dengan iklim tropis dilimpahi kekayaan alam yang luar biasa. Tanah di negara-negara tersebut menjadi subur karena curah hujan yang tinggi. Flora dan fauna menjadi lebih beraneka ragam. Indonesia terbagi menjadi tiga zona waktu yaitu waktu Indonesia bagian timur (WIT), waktu Indonesia bagian tengah (WITA), dan waktu Indonesia bagian barat (WIB). Luas *total* wilayah Indonesia adalah 7,9 juta  $\text{km}^2$  terbagi atas 1,8 juta<sup>2</sup> wilayah daratan, 3,2 juta  $\text{km}^2$  wilayah laut teritorial dan terakhir 2,9 juta  $\text{km}^2$  laut perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Adapun provinsi di Indonesia antara lain:

**TABEL 4.1**

Luas Wilayah 33 Provinsi di Indonesia

<b>Nama Provinsi</b>	<b>Luas Wilayah (Km2)</b>
Aceh	58.375,63
Sumatera Utara	729.811,23
Sumatera Barat	42.297,3
Riau	87.023,66
Jambi	53.435,92
Sumatera Selatan	87.017,41
Bengkulu	19.788,7
Lampung	35.376,5
Kep. Bangka Belitung	18.725,14
Kep. Riau	253.420
DKI Jakarta	664,01
Jawa Barat	353.77,76
Jawa Tengah	328.00,69
Jawa Timur	47.799,75
Banten	9.662,92
Bali	5.780,06
Nusa Tenggara Barat	18.572,32
Nusa Tenggara Timur	48.718,1
Kalimantan Barat	147.307
Kalimantan Tengah	153.564,5
Kalimantan Selatan	38.744,23
Kalimantan Timur	129.066,64
Kalimantan Utara	72.275
Sulawesi Utara	13.851,64
Sulawesi Tengah	61.841,29
Sulawesi Selatan	46.717,48
Sulawesi Tenggara	38.067,7
Gorontalo	11.257,07
Sulawesi Barat	16.787,18
Maluku	46.914,03
Maluku Utara	31.982
Papua Barat	99.671,63
Papua	319.036,05

Sumber: *indonesiadata.com 2019*

Mengutip *World Economic Forum (WEF)* mengenai *The Global Competitiveness Report* untuk tahun 2017/2018, Indonesia menempati peringkat ke-41 dunia, menurun 5 peringkat dari tahun sebelumnya yakni peringkat-36. Tak hanya itu, skor daya saing Indonesia juga turun meski tipis 0,3 poin ke posisi 64,6. Pembangunan infrastruktur yang sedang digiat pemerintah pun tetap tidak berhasil mengangkat peringkat daya saing terkait infrastruktur, Indonesia menempati posisi 72 yang mana turun 1 peringkat dari tahun sebelumnya. Di ASEAN, Indonesia hanya lebih baik dari Filipina dan Vietnam.

Ketersediaan infrastruktur Indonesia masih dianggap kurang misalnya seperti pelabuhan, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas. Fenomena ini membuat biaya logistik di Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain, sehingga terjadi penghambatan pada proses masuk dan keluar barang dari dalam negeri keluar, maupun dari luar negeri ke dalam negeri, dan juga pembengkakan pada biaya logistik. Jika hal ini tidak segera diatasi, dapat kita katakan investor akan memilih menanamkan modalnya di negara lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Brunei Darussalam yang fasilitas infrastruktur dan kawasan industrinya lebih memadai. Pada Infrastruktur jalan, Indonesia masih terus mengalami problem kemacetan yang sudah menjadi makanan sehari-hari di kota-kota

besar. Dengan ini, ketidakefisienan terjadi sebab waktu dan biaya pun terbuang untuk perjalanan. Tidak hanya itu, problematika banjir juga menjadi hal yang biasa terjadi di beberapa kota-kota besar di Indonesia.

## **2. Kondisi Perekonomian Negara Indonesia.**

Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07 persen yang mana lebih rendah dari yang telah ditargetkan dalam APBN- 2017 yaitu sebesar 5,1 persen. Namun, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2014, tahun ini merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yakni sebesar 8,44 persen. Sementara dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang meningkat signifikan sebesar 29,37 persen. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia yakni sebesar 58,65 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,69 persen, dan Pulau Kalimantan sebesar 8,15 persen (BPS, 2017).

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp. 1.395,6 triliun, dapat dikatakan mencapai 80,4% dari rencana dalam APBNP Tahun 2017 sebesar Rp. 1.736,1 triliun. Dari jumlah realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp.

1.125,1 triliun atau 76,4 persen dari target yang tertulis dalam APBNP 2017 sebesar 1.472,7. Pencapaian penerimaan perpajakan tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan, pelemahan impor, dan penurunan harga CPO di pasar internasional. Di sisi lain, kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menunjukkan capaian yang baik dengan realisasi Rp. 266,7 triliun, atau 102,5 persen dari target dalam APBNP Tahun 2017 yakni sebesar 260,2 triliun. Lebih tingginya realisasi tersebut terutama bersumber dari penerimaan PNBP sumber daya alam (SDA) minyak dan gas. Semua target PNBP dalam APBNP Tahun 2017 telah terlampaui kecuali penerimaan SDA non migas yang berasal dari mineral dan batubara (minerba) dan juga kehutanan (Kemenkeu, 2014).

Hal yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi yang digunakan untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi makro dilihat pada pertumbuhan angka Produk Domestik Bruto (PDRB), baik atas harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan diwilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivasi ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB berdasarkan harga konstan (riil) menunjukkan

laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. Perubahan tahun dasar telah dilakukan secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yakni pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Pada tahun 2010 perekonomian Indonesia relatif stabil sehingga tahun 2010 terpilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar sebelumnya yaitu tahun 2000 dan menghasilkan sumber data baru untuk PDRB, Sensus Penduduk, dan Indeks Harga Produsen. Tak hanya itu, dengan ditetapkannya tahun 2010 sebagai tahun dasar baru menghasilkan pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam *System of National Accounts* (SNA) tahun 2008.

Perubahan tahun dasar PDB Indonesia tahun 2000 menjadi tahun 2010 merupakan salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional. Hal ini dilakukan seiring dengan pengadopsian rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertulis dalam *System of National Accounts* (standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi) pada tahun 2008 melalui penyusunan *Supply and Use Tables* (SUT). Untuk menjaga konsistensi hasil perhitungan, dilakukan bersamaan perubahan tahun dasar PDB dengan perhitungan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) provinsi.

**TABEL 4.2**

Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha dengan  
 Harga Konstan menurut Provinsi di Indonesia per-provinsi tahun  
 2013-2017  
 (Miliar Rupiah)

Provinsi	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Aceh	121.331,13	127.897,07	129.092,66	136.843,82	145.806,92
Sumatera Utara	469.464,02	521.954,95	571.722,01	626.062,91	684.275,44
Sumatera Barat	146.899,83	164.944,26	179.951,98	196.099,18	213.889,86
Riau	607.498,45	679.395,86	652.761,63	681.699,03	704.797,58
Jambi	129.976,04	144.814,42	155.065,66	171.199,47	189.868,12
Sumatera Selatan	280.348,46	306.421,60	331.765,70	353.866,96	382.885,70
Bengkulu	40.565,49	45.389,90	50.334,02	55.384,17	60.657,68
Lampung	204.402,64	230.794,45	252.883,10	279.417,62	306.699,74
Kep, Bangka Belitung	50.388,36	56.373,62	60.987,32	65.048,23	69.861,30
Kep, Riau	163.261,57	180.879,98	199.570,39	216.007,66	227.762,69
Dki Jakarta	1.546.876,49	1.762.316,40	1.989.088,75	2.159.073,62	2.365.363,30
Jawa Barat	1.258.989,33	1.385.825,08	1.524.974,83	1.653.238,42	1.788.380,61
Jawa Tengah	830.016,02	922.471,18	1.010.986,64	1.087.316,68	1.172.400,48
Jawa Timur	1.382.501,50	1.537.947,63	1.691.477,06	1.855.738,43	2.012.917,99
Banten	377.836,08	428.740,07	479.300,44	517.898,34	563.463,07
Bali	134.407,53	156.395,73	176.412,67	194.089,58	213.549,58
Nusa Tenggara Barat	73.618,88	81.620,73	105.664,74	116.464,76	123.861,70
Nusa Tenggara Timur	61.325,26	68.500,43	76.120,79	83.742,79	907.57,61
Kalimantan Barat	118.640,96	132.345,29	146.653,55	161.364,24	177.491,12
Kalimantan Tengah	81.956,92	89.889,88	100.063,52	111.967,02	125.824,26
Kalimantan Selatan	115.858,20	127.882,28	137.056,12	146.090,43	159.181,20
Kalimantan Timur	519.131,87	527.515,26	505.105,06	508.880,24	592.279,94
Kalimantan Utara	52.604,70	59.184,00	61.722,39	66.041,81	76.928,27
Sulawesi Utara	71.097,46	80.667,63	91.145,68	100.513,84	110.120,59
Sulawesi Tengah	79.842,22	90.246,27	107.573,47	120.030,01	133.951,16
Sulawesi Selatan	258.836,42	298.033,80	340.390,21	377.108,91	415.744,89
Sulawesi Tenggara	71.041,25	78.622,15	87.714,48	96.994,76	107.423,59
Gorontalo	22.129,28	25.193,78	28.493,42	31.697,56	34.538,00
Sulawesi Barat	25.249,49	29.458,25	32.987,55	35.945,20	39.584,01
Maluku	27.834,44	31.656,48	34.345,96	37.054,41	39.881,62
Maluku Utara	21.439,49	24.042,08	26.638,30	291.50,60	32.272,57
Papua Barat	52.997,66	58.180,96	62.888,03	66.631,08	71.790,56
Papua	122.857,17	133.329,98	150.307,28	173.208,86	188.945,17

Sumber: BPS Indonesia 2013-2017



### 3. Infrastruktur Jalan.

Dalam kegiatan ekonomi terutama pada distribusi barang dan jasa tidak terlepas dari peranan infrastruktur jalan. Di Indonesia transportasi darat masih menjadi andalan hingga saat ini. Perlu diberikan perhatian yang mendalam terkait kondisi dan kualitas maupun kualitas jalan, sebab infrastruktur jalan memiliki peran vital sebagai pendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat cukup besar. Kondisi jaringan yang buruk akan menimbulkan hambatan-hambatan arus barang dan manusia, yang berakibat terjadinya kemacetan (*bottlenecking*) hingga kecelakaan lalu lintas.

Jumlah ukuran panjang jalan di bawah kewenangan Pemerintah di beberapa Provinsi mengalami pengurangan di tahun 2015 dan 2016. Hal ini terjadi karena akuisisi pemerintah pusat. Pemprov dan Kementerian PU Perantara tengah membahas mengenai pengurangan panjang ini. Sebagai gantinya, pemerintah mengakuisisi jalan kabupaten/kota sebagai jalan strategis provinsi. Pengambilan alihan ruas jalan kabupaten/kota akan difokuskan pada jalur yang dapat menopang ekonomi masyarakat setempat.

**TABEL 4.3**

Panjang Jalan per-Provinsi menurut Kewenangan Pemerintah  
Tahun 2013-2017 (km)

<b>Provinsi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Aceh	23.099	23.472	23.824	22.810	24.019	24.019
Sumatera Utara	36.788	37.476	40.528	40.773	39.543	39.453
Sumatera Barat	22.928	23.464	23.598	23.434	22.556	22.556
Riau	24.600	26.347	26.842	27.040	24.992	25.071
Jambi	13.342	14.211	13.886	13.731	13.027	13.027
Sumatera Selatan	17.140	17.789	18.620	18.821	19.233	19.233
Bengkulu	8.516	8.686	9.230	9.237	9.196	9.196
Lampung	19.684	19.189	17.603	21.162	21.044	21.044
Kep. Bangka Belitung	4.864	5.397	5.525	5.433	5.485	5.485
Kep. Riau	4.954	5.632	5.338	5.552	5.686	5.686
Dki Jakarta	7.094	7.094	7.094	7.094	6.732	6.732
Jawa Barat	24.608	25.156	26.274	26.533	26.980	26.870
Jawa Tengah	29.703	30.236	27.545	31.180	30.394	30.394
Jawa Timur	42.555	42.107	41.740	41.834	40.955	40.955
Banten	6.845	6.907	6.969	6.967	6.927	6.992
Bali	7.699	7.850	7.879	8.361	8.678	8.678
Nusa Tenggara Barat	8.083	8.345	8.169	8.223	8.525	8.525
Nusa Tenggara Timur	20.508	21.218	21.752	22.686	23.193	23.193
Kalimantan Barat	15.345	15.770	15.750	17.948	18.234	18.226
Kalimantan Tengah	15.253	15.054	15.081	17.447	17.939	17.939
Kalimantan Selatan	11.687	12.518	12.805	13.623	13.614	13.614
Kalimantan Timur	15.661	15.586	12.463	12.146	13.333	13.333
Kalimantan Utara	4.977	4.977	4.977	4.547	3.183	3.184
Sulawesi Utara	8.607	8.952	9.488	9.742	9.840	9.840
Sulawesi Tengah	18.790	18.045	16.234	16.286	16.565	16.565
Sulawesi Selatan	32.691	32.614	33.215	31.344	30.679	30.679
Sulawesi Tenggara	11.922	10.370	11.424	12.725	13.064	13.064
Gorontalo	4.814	5.250	5.885	5.546	5.495	5.495
Sulawesi Barat	7.039	7.573	6.942	6.409	5.758	5.757
Maluku	7.794	8.273	8.342	9.889	10.213	10.213
Maluku Utara	6.200	7.123	7.100	7.076	7.432	7.432
Papua Barat	8.147	8.728	9.430	9.760	11.867	11.917
Papua	16.773	17.028	18.548	18.702	21.723	21.824

Sumber: BPS Indonesia 2013-2017

Dalam penyediaan infrastruktur tentunya perlu diperhatikan berapa banyak pengguna barang publik tersebut. Grafik yang disajikan diatas adalah panjang jalan per-Provinsi menurut kewenangan wilayah di Indonesia dari tahun 2013-2017 dalam satuan Km. Dilihat dari grafik diatas, secara keseluruhan perhitungan se-Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Tidak hanya kualitas jalan yang perlu diperhatikan, melainkan penambahan panjang jalan yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan tetap akan menciptakan hambatan-hambatan dalam mobilitas ekonomi.

#### **4. Penyaluran Air.**

Dalam kehidupan, air menjadi zat yang sangat penting, tidak hanya bagi manusia namun bagi makhluk hidup lainnya. Kebutuhan akan air terus mengalami peningkatan seiring meningkatnya pula permasalahan pengelolaan sumber daya air seperti alokasi dan distribusi air. Kebutuhan air di Indonesia memerankan peran penting tidak hanya untuk konsumsi rumah tangga dan industri. Secara geografis Indonesia, negara kita merupakan negara dengan wilayah perairan yang melimpah, yang mana bisa dimanfaatkan untuk transportasi air. Indonesia juga merupakan negara agraris, yang sejatinya membutuhkan air untuk mengairi sawah dan perkebunan agar terus berkembang.

**TABEL 4.4**

Jumlah Air yang Disalurkan Perusahaan Air Bersih Menurut Provinsi (m<sup>3</sup>)

<b>Provinsi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Aceh	18.752.000	19.840.000	35.733.000	40.674.000	46.298.000
Sumatera Utara	232.517.000	278.500.000	307.813.000	338.959.000	373.255.000
Sumatera Barat	56.817.000	60.122.000	71.510.000	79.174.000	87.660.000
Riau	15.757.000	14.869.000	17.825.000	19.605.000	21.564.000
Jambi	23.213.000	22.777.000	46.374.000	51.191.000	56.509.000
Sumatera Selatan	113.494.000	113.447.000	161.960.000	196.213.000	237.709.000
Bengkulu	14.473.000	14.630.000	16.099.000	17.022.000	17.998.000
Lampung	14.798.000	15.252.000	17.685.000	18.557.000	19.471.000
Kep. Bangka Belitung	4.050.000	4.714.000	4.026.000	4.191.000	4.363.000
Kep. Riau	73.920.000	78.217.000	100.514.000	112.118.000	125.061.000
Dki Jakarta	369.440.000	323.244.000	451.614.000	487.870.000	527.038.000
Jawa Barat	247.968.000	321.993.000	338.706.000	361.611.000	386.065.000
Jawa Tengah	283.336.000	305.526.000	394.527.000	422.839.000	453.184.000
Jawa Timur	435.745.000	452.749.000	634.826.000	674.586.000	716.836.000
Banten	206.305.000	196.970.000	228.983.000	256.123.000	28.648.000
Bali	145.400.000	151.144.000	111.075.000	115.096.000	119.263.000
Nusa Tenggara Barat	48.020.000	49.918.000	56.432.000	60.001.000	63.797.000
Nusa Tenggara Timur	27.354.000	27.041.000	33.294.000	36.666.000	40.380.000
Kalimantan Barat	40.786.000	47.447.000	49.128.000	52.799.000	56.744.000
Kalimantan Tengah	26.236.000	23.844.000	32.904.000	36.292.000	40.029.000
Kalimantan Selatan	82.114.000	82.591.000	87.641.000	94.945.000	102.858.000
Kalimantan Timur	106.778.000	119.237.000	149.794.000	165.377.000	182.581.000
Kalimantan Utara	8.894.000	12.882.000	15.674.000	20.887.000	27.833.000
Sulawesi Utara	19.190.000	17.906.000	21.918.000	23.298.000	24.766.000
Sulawesi Tengah	20.698.000	18.134.000	13.058.000	12.387.000	11.751.000
Sulawesi Selatan	86.792.000	102.942.000	147.282.000	176.949.000	212.592.000
Sulawesi Tenggara	10.988.000	10.747.000	14.153.000	15.256.000	16.446.000
Gorontalo	10.129.000	11.715.000	14.321.000	15.941.000	17.744.000
Sulawesi Barat	5.250.000	5.610.000	6.160.000	6.648.000	7.174.000
Maluku	7.209.000	6.859.000	12.368.000	14.656.000	17.367.000
Maluku Utara	4.784.000	6.019.000	15.811.000	21.456.000	29.116.000
Papua Barat	3.923.000	3.912.000	6.276.000	7.229.000	8.327.000
Papua	14.025.000	15.058.000	15.864.000	17.959.000	20.330.000

Sumber: BPS Indonesia 2013-2017

Pada data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) konsumsi air di Indonesia dilihat dari volume air yang disalurkan Perusahaan Air Minum (PAM) yang tiap tahunnya terus mengalami fluktuasi kearah positif dari tahun 2013 sampai dengan 2015. Peningkatan distribusi air bersih dimasyarakat harus terus dilakukan tidak hanya untuk mengatasi kelangkaan air dimasyarakat, tapi juga mengatasi permasalahan lain seperti kemiskinan. Mengutip *World Bank* pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi dapat terhambat jika terjadi kelangkaan air yang disertai perubahan iklim, yakni dengan berkurangnya Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

#### **5. Kapasitas Listrik Lokal.**

Energi adalah hal yang penting didalam kehidupan manusia, terlebih energi listrik merupakan energi utama dalam melakukan aktivitas rumah tangga, industri, bisnis, dan berbagai sektor perekonomian lainnya. Mengutip buku yang berjudul “*The Economic Growth Engine: How Energy and Works Drive Material Prosperity*” yang ditulis oleh Ayres, energi khususnya tenaga listrik merupakan *driver* dari ekonomi (Effendi, 2017).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pendistribusian listrik di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, mengingat kebutuhan akan energi listrik dimasyarakat pun turut meningkat tiap tahunnya.

**TABEL 4.5**

Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Menurut Provinsi (Mega Watt)

<b>Provinsi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Aceh	128,54	201,25	232,10	201,27	224,27
Sumatera Utara	3.625,32	4.116,45	4.241,54	4.579,14	4.832,95
Sumatera Barat	32,91	72,67	81,15	81,27	59,03
Riau	175,48	172,62	173,80	339,50	353,76
Jambi	50,06	51,54	60,37	68,57	50,57
Sumatera Selatan	2.663,26	3.018,06	3.146,21	4.583,62	4.494,22
Bengkulu	24,04	43,54	25,89	55,47	47,20
Lampung	124,79	121,21	121,12	121,12	124,38
Kep, Bangka Belitung	106,46	234,71	314,56	274,56	265,40
Kep, Riau	381,21	736,48	736,80	839,51	882,54
Dki Jakarta	1.448,00	1.348,00	1.359,54	4.536,77	6.095,82
Jawa Barat	3.998,74	4.076,66	4.077,90	9.855,26	7.272,16
Jawa Tengah	5.153,86	5.154,85	5.155,26	7.224,78	7.096,65
Jawa Timur	11.547,76	14.668,05	14.669,40	9.435,57	8.199,50
Banten	11.703,54	12.873,34	12.873,34	9.739,15	7.443,90
Bali	454,02	441,89	1.017,19	729,69	911,39
Nusa Tenggara Barat	170,04	445,39	393,80	472,10	418,49
Nusa Tenggara Timur	160,54	272,80	297,25	337,73	302,69
Kalimantan Barat	243,03	508,09	653,49	683,40	603,49
Kalimantan Tengah	76,00	76,00	71,65	351,97	356,76
Kalimantan Selatan	478,32	645,41	1.671,13	1.675,52	1.831,94
Kalimantan Timur	518,50	977,56	1.053,03	1.144,95	1.437,95
Kalimantan Utara	31,22	84,82	99,82	103,31	73,60
Sulawesi Utara	345,19	350,45	358,03	486,24	580,77
Sulawesi Tengah	198,09	422,41	421,12	496,46	490,62
Sulawesi Selatan	1.084,85	968,92	1.232,35	1.500,41	1.450,85
Sulawesi Tenggara	129,24	233,07	127,47	217,74	296,59
Gorontalo	31,44	64,73	31,49	73,30	56,83
Sulawesi Barat	12,39	11,68	3,22	6,22	3,22
Maluku	147,61	211,79	236,76	290,75	263,37
Maluku Utara	49,60	65,70	73,81	70,85	124,38
Papua Barat	66,64	102,80	112,76	165,38	403,59
Papua	106,30	242,44	271,14	272,75	128,19

Sumber: BPS Indonesia 2013-2017

## **6. PMA (Penanaman Modal Asing).**

Penanaman Modal Asing adalah salah satu sumber pendanaan yang bisa digunakan sebagai pembiayaan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Penanaman Modal Asing menggantikan utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan. Penanaman Modal Asing merupakan investasi asing yang kegiatannya secara langsung dilakukan oleh atau berdasarkan ketentuan hukum ini dan digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dan pemilik modal langsung menanggung risiko dari investasi.

Mengutip Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang PMA (Penanaman Modal Asing), penanaman modal asing meliputi penanaman modal asing secara langsung yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Dengan ini, para pemilik modal menanggung risiko atas penanaman modal tersebut secara langsung, juga penanaman modal asing melalui portfolio dan surat-surat berharga. Peraturan ini kemudian disempurnakan dengan disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2007, yang mana mendefinisikan Penanaman Modal Asing merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

**TABEL 4.6**

Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut  
Provinsi (Juta Rupiah)

<b>Provinsi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Aceh	1.153.950	388.812	290.991	1.798.131	312.736
Sumatera Utara	10.871.875	6.886.102	17.103.969	13.565.524	20.420.852
Sumatera Barat	1.119.650	1.401.474	783.755	1.060.162	2.620.512
Riau	15.985.025	17.121.489	8.968.568	11.618.998	14.303.628
Jambi	420.175	642.603	1.478.290	815.509	1.035.264
Sumatera Selatan	5.952.275	13.208.363	8.864.251	37.346.302	1.5945.492
Bengkulu	273.175	241.289	282.756	744.653	1.869.676
Lampung	573.300	1.956.563	3.537.190	1.145.723	1.625.688
Kep. Bangka Belitung	1.376.900	1.312.710	1.135.140	704.546	2.063.788
Kep. Riau	3.867.325	4.902.034	8.790.130	6.939.848	13.904.620
Dki Jakarta	31.740.975	56.376.519	49.679.884	45.430.536	6.1940.600
Jawa Barat	87.280.025	82.038.124	78.769.396	73.140.462	69.326.292
Jawa Tengah	5.687.675	5.793.427	11.672.590	13.780.765	31.981.300
Jawa Timur	41.604.675	22.534.855	35.597.008	25.949.229	21.119.116
Banten	45.572.450	25.436.569	34.891.492	38.931.865	41.080.300
Bali	4.788.525	5.339.604	6.805.351	6.024.071	11.955.412
Nusa Tenggara Barat	5.980.450	6.889.852	9.599.964	5.868.991	1.780.708
Nusa Tenggara Timur	121.275	188.780	959.447	778.076	1.873.720
Kalimantan Barat	7.962.500	12.078.182	18.333.818	8.431.828	7.662.032
Kalimantan Tengah	5.899.600	11.889.402	12.814.594	5.457.226	8.640.680
Kalimantan Selatan	3.192.350	6.282.255	13.193.431	3.334.229	3.286.424
Kalimantan Timur	16.358.650	26.825.541	32.687.096	15.235.312	17.324.496
Kalimantan Utara	562.275	1.353.967	3.169.333	2.149.735	2.008.520
Sulawesi Utara	804.825	1.230.197	1.207.888	5.117.653	6.509.492
Sulawesi Tengah	10.473.750	18.680.488	14.895.455	21.394.411	20.834.688
Sulawesi Selatan	5.669.300	3.511.812	3.202.276	4.979.953	9.608.544
Sulawesi Tenggara	1.058.400	2.022.824	1.990.270	5.028.081	9.341.640
Gorontalo	314.825	51.258	94.709	169.786	556.724
Sulawesi Barat	30.625	203.783	27.452	275.401	153.672
Maluku	646.800	163.776	1.131.022	1.371.659	2.857.760
Maluku Utara	3.289.125	1.233.947	2.797.359	5.867.654	3.074.788
Papua Barat	663.950	1.917.807	3.549.544	6.878.351	1.141.756
Papua	28.910.000	15.760.021	12.312.222	15.620.340	25.936.868

Sumber: BPS Indonesia 2013-2017



Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwasannya perkembangan PMA di Indonesia terus mengalami fluktuasi kearah yang positif setiap tahunnya. Menurut Muhammad (2013), kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Terdapat tiga fungsi penting yang menjadi sumber dari kegiatan investasi dalam perekonomian negara.

Pertama, investasi adalah salah satu bagian dari pengeluaran agregat. Maka dengan meningkatnya investasi maka meningkat pula permintaan agregat dan pendapatan nasional. Kedua, Investasi mengakibatkan pertambahan akan barang modal yang mana akan menambahkan kepastian memproduksi dimasa depan dan menstimulir pertambahan produksi nasional dan kesempatan kerja. Ketiga, investasi membuahkan perkembangan teknologi yang mana akan memberikan sumbangan terhadap kenaikan produktivitas dan pendapatan per kapita masyarakat.